



LAPORAN SINGKAT
KOMISI VI DPR RI: BIDANG INDUSTRI, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM,
BUMN, DAN INVESTASI

Rapat ke	:	24 (<i>dua puluh empat</i>)
Tahun Sidang	:	2019-2020
Masa Persidangan	:	II
Jenis Rapat	:	Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan PT Utama Karya (Persero), PT Wijaya Karya (Persero), PT Waskita Karya (Persero), PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk.
Hari, Tanggal	:	Senin, 17 Februari 2020
Pukul	:	10.00 WIB
Sifat Rapat	:	Terbuka
Pimpinan Rapat	:	Mohamad Hekal, M.B.A. Wakil Ketua Komisi VI DPR RI
Sekretaris Rapat	:	Dewi Resmini, S.E., M.Si., Kabagset. Komisi VI DPR RI
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Gedung Nusantara I Lt. Dasar Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270
A c a r a	:	1. Perkenalan; 2. Pembahasan isu aktual di masing-masing BUMN, dan 3. Lain-lain.
Hadir	:	1. dari 54 Anggota Komisi VI DPR RI; 2. Direktur Utama PT Utama Karya (Persero), Bintang Perbowo; 3. Direktur Utama PT Wijaya Karya (Persero), Tumiyana; 4. Direktur Utama PT Waskita Karya (Persero), I Gusti Ngurah Putra; 5. Direktur Utama PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, Ir. Lukman Hidayat; dan 6. Direktur Utama PT Adhi Karya (Persero) Tbk, Budi Harto, beserta jajaran.

I. PENDAHULUAN

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Ketua Rapat membuka Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan PT Utama Karya (Persero), PT Wijaya Karya (Persero), PT Waskita Karya (Persero), PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk pada pukul 10.50 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

2. Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI pada hari Senin, 17 Februari 2020, dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Mohamad Hekal, M.B.A.

II. KESIMPULAN

1. Komisi VI DPR RI meminta BUMN Bidang Konstruksi, Sarana dan Prasarana yaitu PT Utama Karya (Persero), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk untuk berkomitmen menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance*), dan pedoman perilaku (*code of conduct*) sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
2. Komisi VI DPR RI meminta BUMN Bidang Konstruksi, Sarana dan Prasarana yaitu PT Utama Karya (Persero), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk berfungsi sebagai entitas perusahaan yang untung, bertumbuh dan dapat bersaing sehat dengan perusahaan lainnya termasuk swasta.
3. Komisi VI DPR RI meminta BUMN Bidang Konstruksi, Sarana dan Prasarana yaitu PT Utama Karya (Persero), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk untuk mengemban misi negara guna mewujudkan pertumbuhan usaha konstruksi termasuk berkolaborasi dengan perusahaan konstruksi swasta nasional dan menjadi lokomotif penggerak perekonomian masyarakat.
4. Komisi VI DPR RI meminta BUMN Bidang Konstruksi, Sarana dan Prasarana yaitu PT Utama Karya (Persero), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk untuk mampu mewujudkan pembangunan yang sudah dicanangkan oleh Pemerintah, yang salah satunya pembangunan Ibu Kota Negara baru.
5. Komisi VI DPR RI meminta BUMN Bidang Konstruksi, Sarana dan Prasarana yaitu PT Utama Karya (Persero), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk untuk melakukan pembenahan keuangan perusahaan dan menyelesaikan seluruh kewajiban kepada para vendor sesuai dengan aturan yang berlaku.
6. Komisi VI DPR RI meminta BUMN Bidang Konstruksi, Sarana dan Prasarana yaitu PT Utama Karya (Persero), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk untuk melakukan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) agar mampu bersaing di tingkat regional dan global.
7. Komisi VI DPR RI meminta BUMN Bidang Konstruksi, Sarana dan Prasarana yaitu PT Utama Karya (Persero), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk agar dapat memenuhi kualitas standar internasional dalam pekerjaannya, dengan memprioritaskan penggunaan bahan baku dalam negeri (konten lokal) untuk keperluan pembangunan infrastruktur.

8. Komisi VI DPR RI meminta PT Utama Karya (Persero), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk untuk dapat memberikan gambaran terintegrasi seluruh pembangunan infrastruktur seperti tol, jalan trans, bendungan, dan lain-lain di seluruh Indonesia yang dikoordinasikan oleh PT Utama Karya (Persero).
9. Komisi VI DPR RI meminta BUMN Bidang Konstruksi, Sarana dan Prasarana yaitu PT Utama Karya (Persero), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk agar membuat ikhtisar Laporan Keuangan Standar 5 (*lima*) tahun terakhir yang meliputi:
 - a. Laporan Posisi Keuangan pada akhir periode;
 - b. Laporan Laba Rugi Komprehensif selama periode;
 - c. Laporan Perubahan Ekuitas selama periode;
 - d. Laporan Arus Kas selama periode; dan
 - e. Catatan penting atas Laporan Keuangan.
10. Komisi VI DPR RI meminta BUMN Bidang Konstruksi, Sarana dan Prasarana yaitu PT Utama Karya (Persero), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk untuk memberikan jawaban secara tertulis dalam waktu paling lama 5 (*lima*) hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi VI DPR RI yang akan dijadikan sebagai bahan masukan dalam Rapat Kerja dengan Menteri BUMN.

Catatan:

1. Komisi VI DPR RI memahami adanya kebutuhan Penyertaan Modal Negara (PMN) dan meminta kepada BUMN-BUMN Bidang Konstruksi yang memerlukan untuk segera mengajukannya kepada Menteri BUMN, untuk selanjutnya dibahas di Komisi VI DPR RI.
2. Komisi VI DPR RI meminta BUMN-BUMN Bidang Konstruksi, Sarana dan Prasarana untuk bersinergi membantu program-program pemerintah dalam hal penyediaan pangan dan perumahan.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 15.22 WIB.

Jakarta, 17 Februari 2020
PIMPINAN KOMISI VI DPR RI
KETUA RAPAT,

TTD.

MOHAMAD HEKAL, M.B.A.
A-103